

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dewi, Rahayu Kusuma. *Studi Analisis Kebijakan*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*. n.d. Jakarta: Kencana, 2017.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. 12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Widodo. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Jurnal:

- Affandi, Hernadi. "Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin." *Postitum*, 2016 1 (n.d.).
- Akbaruddin, Syaiful. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya." *Doctoral Dissertation Universitas Airlangga*, 2018, 1–7.
- Fahlevi, Megan, and Margo Hadi Putra. "Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humanoria* Vol.9 No., no. 5 (2022): 2782–90.
- Faozan, Haris. "Menyikapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah Lompatan Kolaborasi Strategik Global: Sebuah Prognosa Awal." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2007. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/407>.
- "Justifikasi Hukum," n.d.
- Kencana, Inu. *Ilmu Negara Kajian Ilmiah Dan Keagamaan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Nurbaningsih, Enny. "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 168. <https://doi.org/10.22146/jmh.16197>.

Panrb. “Lembaga Pemerintah Pusat.” menpan.go.id, 2021.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. “Sinergitas Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* volume 20, no. no 2 (2023): hlm 70. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/61/pdf>.

Putra, Imam Radianto Anwar Setia. “Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Identification the Implementation of Regional Cooperation.” *Jurnal Bina Praja* 5, no. 1 (2013): 113–22.

Rahman, Khairul, and Universitas Islam Riau. “The National Conference on Local Government and Development 2019.” *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, no. November 2019 (2020): 106–10.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.

Surat Kabar, *Web-Site*, Berita, KBBI

<https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 21 Juli 2024 Pukul 20.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> diakses pada 21 Juli 2024 Pukul 20.41 WIB.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA